



Berawal Dari Rapat di Hotel

Kepala Sekolah Mengaku Disuruh Mengajukan Permohonan Bantuan UPS

PADA suatu sore di Juli 2014, sejumlah kepala SMA dan SMK negeri di Jakarta Barat berkumpul di Hotel Ciputra, Grogol, Jakarta Barat.

Kehadiran mereka atas undangan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah (Sudin Dikmen) Jakarta Barat yang saat itu dijabat Slamet Widodo. Pertemuan itu terjadi pada 22 Juli 2014. Dalam surat undangan, salah satu agenda yang tertera ialah 'penataan instalasi listrik gedung sekolah'.

Dalam acara yang bertajuk buka puasa bersama itu berujung pada presentasi sejumlah perusahaan penyuplai *uninterruptible power supply* (UPS) di hadapan para kepala sekolah.

Pemaparan profil alat yang sama sekali asing di kuping mereka itu menjadi awal cerita proyek pengadaan senilai Rp145,76 miliar di Sudin Dikmen Jakarta Barat.

Para tamu undangan telah hadir, tapi Slamet belum terlihat. Karena itu, acara dibuka dengan sambutan dari Kepala Seksi Sarana Prasarana Sudin Dikmen Alex Usman.

Di awal sambutan, Alex membahas soal satuan pengamanan (satpam) dan *office boy* (OB) sekolah.

Setelah itu, dia masuk ke masalah listrik. "Kalau cuma lampu-lampu itu bisa dari PLN saja. Namun, kalau barang elektronik yang pakai daya 60 ribu watt itu kan perlu kestabilan, perlu UPS," tutur Kepala SMAN 19 Sohibul Bakhri menirukan penjelasan Alex dalam pertemuan itu.

"UPS apa, saya enggak mengerti," imbuh Sohibul saat ditemui *Media Indonesia* di Jakarta, pekan lalu.

Kepala SMAN 101 Arif Noor-yanto juga mengaku hadir dalam pertemuan tersebut. Adapun Kepala SMAN 65 Anang Burhan mengaku berhalangan hadir karena sakit, tetapi pihaknya mengirimkan perwakilan untuk hadir. Surat permohonan serupa pun mereka ajukan setelah pertemuan tersebut atas imbauan pihak sudin.

Sohibul menambahkan, setelah sambutan singkat itu, acara dilanjutkan dengan presentasi para penyuplai UPS yang hadir. "Saya tidak ingat ada berapa perusahaan. Cukup banyak, mereka presentasi ganti-gantian sampai menjelang magrib," ungkapnya.

Seusai paparan, Alex meminta pihak sekolah mengajukan usulan. "Namun tidak langsung malam itu. Saya sendiri enggak mengerti UPS itu modelnya kayak apa. Saya sampai mengusulkan minta 10 biji, ya, karena enggak kebayang," ujar dia.

Dalam pemeriksaan di Polda Metro Jaya Senin (9/3), Sohibul yang hadir sebagai saksi mengaku mengusulkan bantuan berupa UPS. "Namun, saya bilang, sebagai pengusul kami disuruh," ujarnya.

Dari dokumen surat permohonan beberapa sekolah yang didapatkan *Media Indonesia*, terlihat kesamaan format. Sejumlah sekolah mengakui konsep surat pengajuan tersebut telah disiapkan pihak sudin.

Sohibul mengaku memesan 10 unit UPS karena membayangkan perangkat komputer di 13 ruangan di sekolahnya. Dia membayangkan UPS yang dimaksud ialah unit yang kecil.

"Waktu itu saya berpikir, wah boleh juga ini ada alat yang dapat menyimpan listrik, apalagi listrik sering kali padam

di sekolah. Kalau saya tahu itu beratnya sampai 12 ton dan sebesar itu, ya, mana mungkin saya ajukan," terangnya.

Seusai pemaparan, para kepala sekolah itu membenarkan Slamet Widodo hadir. Hanya, Slamet sama sekali tidak menyinggung perihal UPS. Pada proyek pengadaan UPS 2014, Slamet bertindak sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA).

Ketika berusaha dikonfirmasi, Slamet tidak dapat ditemui di kantornya. Pria yang kini menjabat Kasudin Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat itu sudah lama tidak berkantor.

"Pak Slamet operasi kaki. Sakitnya sudah lama," ujar petugas penerima tamu di Kantor Sudin Pendidikan Wilayah I, lantai 11 Gedung B Pemkot Jakarta Barat, Selasa (10/3).

Hingga berita ini diturunkan, telepon seluler (ponsel) Slamet dalam keadaan tidak aktif.

Sejak kasus pengadaan UPS mencuat, kalangan Sudin Pendidikan Jakarta Barat pun tidak mengetahui kabar Slamet secara pasti. "Saya telepon tidak diangkat, SMS tidak dibalas. Saya berkoordinasi paling dengan Kasubag PU-nya," ujar Kasudin Pendidikan Wilayah II Jakarta Barat Samlawi.

Perihal sakit yang diderita Slamet pun, menurutnya, masih kabar sumir. "Bukan hanya wartawan yang tanya. Katanya dirawat di Gatot Subroto, tapi dicek ke sana juga tidak ketemu," imbuhnya.

Pembahasan APBD

Palu yang diketuk pada sidang paripurna DPRD DKI 27 Januari menandai disetujuinya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)



DKI Tahun Anggaran (TA) 2015 sebesar Rp73,08 triliun.

Kekisruhan dimulai ketika Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menemukan dugaan anggaran siluman sebesar Rp12,1 triliun yang merugikan negara. "Modus *nyolongnya* sama dengan 2014," ujar pria yang akrab disapa Ahok itu.

Hasil penyelidikan Ahok menunjukkan permainan anggaran itu salah satunya terjadi di sektor pendidikan. Pengadaan paket *uninterruptible power supply* (UPS) untuk sejumlah sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) menjadi proyek nakal pertama yang diungkapkan Ahok.

Dia sudah mencium busuk di sektor pendidikan sejak 2014 kala Dinas Pendidikan DKI masih dikepalai Taufik Yudi Mulyanto. Ahok kemudian menggantinya dengan Lasro Marbun yang berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp3,4 triliun dari dugaan potensi korupsi pengadaan pot bunga di seko-

lah. Lasro mengaku kecolongan proyek pengadaan UPS.

Pembahasan revisi APBD DKI TA 2015 bersama Kementerian Dalam Negeri dilakukan kemarin. Ahok berkeras akan menolak jika anggaran Rp12,1 triliun tersebut masuk sebagai komponen APBD 2015.

Dia mengetahui imbas penolakannya itu adalah tidak berlanjutnya pembahasan. Untuk menghadapi kemungkinan itu, Ahok sudah menyiapkan jalan keluar, yakni menggunakan APBD DKI TA 2014.

"Nah kalau mereka mengatakan itu tidak dibahas, sekarang kita lihat saja. Kalau mau, bandingkan komponen yang mereka pakai sama kita," ujarnya.

Bahkan Ahok mengajak DPRD dan seluruh warga Jakarta melihat perbandingan APBD DKI TA 2015 yang dibuat pengelola situs *Kawalapbd.org*, Ainun Najib. Dalam situs tersebut terlihat DPRD DKI memotong anggaran dalam APBD DKI TA 2015 sebanyak 10%-15%.

"Semua di-*crop* (dipotong).

Duitnya buat mengisi anggaran yang sebesar Rp12,1 triliun itu. Jadi apa bedanya APBD DKI yang dituduh DPRD tidak tahu-menahu tidak membahas dengan versi mereka? Tahunya cuma beda dua saja. Punya kami dikurangi 10%-15%, duitnya buat *masukin* sebesar Rp12,1 triliun. Itu saja," ungkapnya. (SSR/SU/T-2)

Temuan Terkait dengan Perusahaan Pemenang Tender UPS

Nama Sekolah	Pemenang Tender	Temuan
<ul style="list-style-type: none"> SMKN 39 dan 13 SMAN 27 	PT Hampan Anugrah Sentosa PT Anugerah Indah Mahakarya	Kedua perusahaan memiliki alamat sama. Alamat kantor tidak ditemukan
<ul style="list-style-type: none"> SMAN 112 	Betina Agung	Kantor berupa rumah
<ul style="list-style-type: none"> SMAN 27 	CV Bintang Mulia Wisesa	Kantor tempat servis AC
<ul style="list-style-type: none"> SMAN 10 	PT Frislianmar Masyur Mandiri	Kantor merangkap percetakan, fotokopi, bimbingan belajar, dan pengiriman barang.
<ul style="list-style-type: none"> SMAN 4 dan 17 	PT Aurel Duta Sarana	Alamat kantor tidak ditemukan, terdaftar di Ditjen Pajak sebagai penyedia jasa angkutan.
<ul style="list-style-type: none"> SMAN 2 dan 16 	PT Barkanatas Dharma	Kantor berupa tempat tinggal tidak berpenghuni. Papan nama baru dipasang beberapa minggu lalu.
<ul style="list-style-type: none"> SMAN 101 dan 1 	CV Padang	Kantor berupa rumah dan memiliki izin konstruksi, pertanian, dan komputer.
<ul style="list-style-type: none"> SMAN 19 	PT Putri Karunia Hati	Alamat tidak ditemukan. Satpam mengaku melihat papan nama perusahaan setahun lalu.
<ul style="list-style-type: none"> SMAN 35 dan 65 	PT Astrasea Pasirindo	Kantor berupa tempat tinggal. Perusahaan tersangkut kasus dugaan korupsi mobil toilet VVIP Pemprov DKI tahun anggaran 2009 senilai Rp5,328 miliar.
<ul style="list-style-type: none"> SMAN 33 	CV Tunjang Langit	Alamat tidak ditemukan.

Sumber: ICW/Tim Media



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) 19 JAKARTA
 Jalan Permangasan 31 Tambora Jakarta Barat 11230
 Telepon: 6904454, 6902830
 Website: <http://www.sma19jakarta.sch.id> - Email: sma19jakarta@yahoo.com

Nomor: 291-1.851.65
 Lampiran: 1
 Hal: Permohonan Bar

Kepada:
 Yth. Bapak Kepala Suda Pendidikan
 Kota Administrasi Jakarta Barat
 Uj. Kasi Surpadik
 Gedung B Lt.17 Jl. Raya Kembangan No. 2
 Jakarta Barat

Dengan hormat,
 Bersama ini kami sampaikan permohonan untuk mendapatkan barang yang diperlukan di SMA Negeri 19 Jakarta.

Adapun perincian yang tertera sebagai berikut:

1. Uleni seropok 1 Porsi 5
2. Peralatan Sains Moder
3. Sisaana Pembelajaran P

Demikian permohonan ini kami sampaikan terlampir.

yang mana
Harif

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 65 JAKARTA
 Jl. Raya Panjang Kebon Jeruk Jakarta Barat - 11930
 Telp : 5492759, 5494745

Nomor: 023-1.851.62
 Lampiran: 1
 Hal: Usul Permohonan Barang

23 Juli 2014

Kepada:
 Yth. Kepala Suda Dikmen
 Kota Adm. Jakarta Barat
 Jl. Raya Kembangan No. 2
 Jakarta Barat

Dengan hormat, saya sampaikan permohonan untuk mendapatkan barang yang diperlukan di SMA Negeri 65 Jakarta.

1. Usul

1 Paket
 1 Paket
 1 Paket

10101010

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
 Jl. Raya Permangasan No. 2, 16. 176000 Jakarta Barat Gd B Lt. 11, Telp. 021 6920830
JAKARTA

Nomor: 270/1074.22
 Hal: Permohonan
 Lampiran: 1
 Hal: Undangan

16 Juli 2014

Kepada:
 Yth. 1. Kepala SMA Negeri
 2. Kepala SMK Negeri
 Di lingkungan Suda Dikmen
 Kota Administrasi Jakarta Barat
 di
 Jakarta

Dengan ini saya mengundang kehadiran Saudara dalam pertemuan yang akan diselenggarakan pada:

hari, tanggal: Selasa, 22 Juli 2014
 waktu: Pukul 16.00 s.d. selesai
 tempat: Hotel Ciputra
 Jl. G. Prapanan, Grogol, Jakarta Barat

acara:

1. Penyerahan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Penataan Instalasi Listrik Gedung Sekolah
3. Bida Purna Kersama

Atas perhatian dan kehadiran Saudara tepat pada waktunya, saya ucapkan terima kasih.

Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah
 Kota Administrasi Jakarta Barat,
 Drs. H. Sunardi Widodo, M.Pd
 NIP. 196005201986031007

Tembusan